



RENCANA KERJA (RENJA) DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN TAHUN 2025

**PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN**



PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

Jalan Raya Cijulang Dusun Cibenda RT 001/RW 012 Desa Cibenda-Parigi
Telp/Fax (0265)2641231 Kode Pos 46393 Email : dlhkpangandaran@yahoo.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
NOMOR : 050/Kpts. 42.a -DLHK/2024

TENTANG

RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2025

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
KABUPATEN PANGANDARAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, perlu disusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran Tahun 2025;
- b. bahwa Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 disusun berpedoman pada Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 40 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran tentang Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran Tahun 2025.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang

- telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);

19. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
31. Peraturan Menteri Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021

tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 252);
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9, Tambahan Lembaran

Daerah Nomor 262);

37. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 25);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);
40. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4

- Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 4);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2);
44. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran;
45. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 53);
46. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 11);
47. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 26);
48. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 40 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 40);

49. Keputusan kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran Nomor 050/Kpts. 352 -DLHK/2022 tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas lingkungan Hidup dan Kebersihan Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : RENCANA KERJA (RENJA) DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2025

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran ini, yang dimaksud dengan :

1. Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
2. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Tahun 2021-2026, yang selanjutnya disebut Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Tahun 2025 yang selanjutnya disebut Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran adalah dokumen perencanaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

BAB II SISTEMATIKA RENCANA KERJA Pasal 2

Sistematika Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran berpedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD. Dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
1.1	Latar Belakang
1.2	Landasan Hukum
1.3	Maksud dan Tujuan
1.4	Sistematika Penulisan
BAB II	HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah;
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah;
2.3	Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah
2.4	Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5	Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III	TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1	Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
3.2	Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
3.3	Program dan Kegiatan
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD
BAB V	PENUTUP

BAB III
ISI DAN URAIAN RENJA
Pasal 3

Isi beserta uraian Rencana Kerja (Renja) sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 4

Rencana Kerja (Renja) DLHK Tahun 2025 dijadikan pedoman Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) DLHK Tahun 2025.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan Kepala DLHK ini sepanjang mengenai Teknis Pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala DLHK.

Ditetapkan di : Parigi
Pada tanggal : 26 Juli 2024

Kepala
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kabupaten Pangandaran



DEDI SURACHMAN, S.SOS., M.M
NIP : 19710628 200312 1 005

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas karunia dan Hidayah-Nya, kami telah menyelesaikan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran Tahun Anggaran 2025.

Dalam rangka mewujudkan kegiatan pembangunan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai pada Tahun 2025, Rencana Kerja (RENJA) ini dibuat sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pangandaran.

Akhirnya, semoga Rencana Kerja (RENJA) ini dapat bermanfaat dan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai sasaran dan tujuan dimaksud.

Parigi, 26 Juli 2024

Kepala
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kabupaten Pangandaran



DEDI SURACHMAN, S.SOS., M.M

NIP : 197106282003121005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. LATAR BELAKANG	1
1.2. LANDASAN HUKUM	2
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN	8
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN	9
BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN TAHUN	
LALU.....	13
2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN	
LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	13
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	20
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI	
PERANGKAT DAERAH.....	22
2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD	24
2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT	31
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	33
3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL	33
3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH	35
3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN	36
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD	42
BAB V. PENUTUP	44

DAFTAR TABEL

1. Tabel T-C.29 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD.....	14
2. Tabel T-C.30 Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD.....	21
3. Tabel T-C.31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD.....	26
4. Tabel T-C.32 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan.....	32
5. Tabel T-C.33 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD.....	38

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan mempunyai Rencana Kerja Tahunan (Renja SKPD) sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Resntra) SKPD. Untuk itu berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) jangka waktu 5 tahun Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program, sedangkan Renstra dijabarkan lebih lanjut kedalam perencanaan tahunan yaitu Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kersihan Kabupaten Pangandaran.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 merupakan Rencana Kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah di rencanakan di dalam dokumen Rencana Awal (RANWAL) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran Tahun 2025. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran dan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, yang merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Lingkungmempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan kebijakan teknis operasional, mengkoordinasikan, melaksanakan kerjasama dan melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup, sebagian Urusan Pekerjaan Umum, Tata

Ruang, sub Urusan Persampahan dan Pemukiman, sub Urusan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) khususnya Pertamanan dan Pemakaman yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud di atas, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan bidang Penataan dan penataan PPLH, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup;
- b. Pelaksanaan kebijakn bidang penataan dan penataan PPLH, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan pengendalian pencmaran dan kerusakan Lingkungan Hidup;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pada bidang penataan dan penataan PPLH, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dan pengendalian pencemaran dan kerusakan Lingkungan Hidup;
- d. Pelaksanaan daministrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati.

1.2.LANDASAN HUKUM

Peraturan Perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten pangandaran Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
19. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);

23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

31. Peraturan Menteri Dalam Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran, Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 236);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 237) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 252);
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
37. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 25);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2025

- (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 15);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24);
 40. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2016 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 9);
 41. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2018 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3);
 42. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2021 Nomor 4);
 43. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 2);
 44. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 60 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas Dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran;
 45. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 24 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2017 Nomor 53);
 46. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas

- Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 11);
47. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 26 Tahun 2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 26);
48. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 40 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2024 Nomor 40);
49. Keputusan kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran Nomor 050/Kpts. 352 -DLHK/2022 tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas lingkungan Hidup dan Kebersihan Tahun 2021-2026.

1.3.MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kabupaten Pangandaran Tahun 2025 antara lain adalah:

1.3.1. Maksud

- a. Menyediakan dokumen rencana teknis Dinas Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dengan menggunakan pendekatan kinerja yang diawali dengan pernyataan masalah dan target kinerja yang terukur, penetapan arah kebijakan teknis yang fokus, lengkap dengan informasi mengenai lokasi dan kelompok sasaran kegiatan;
- b. Menyediakan alat bantu dalam rangka memudahkan penyusunan dan penyampaian laporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan atas pelaksanaan program dan kegiatan secara terukur;
- c. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2025;
- d. Penyesuaian Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tahun 2023 merupakan langkah adaptasi program dan kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2025.

1.3.2. Tujuan

- a. Sebagai dasar bagi SKPD dalam mengoperasionalkan RKPD sesuai dengan tugas dan fungsinya;

- b. Menyeleraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah dengan usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang RKPD di Kecamatan;
- c. Mempertajam indikator dan target program serta kegiatan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- d. Menyeleraskan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan untuk sinergi pelaksanaan prioritas pembangunan daerah;
- e. Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah.

1.4.SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah;

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

2.3 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai :

- a. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah;
- b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti NSPK, SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals);
- d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah; dan
- e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai :

- a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda; dan

d. Lampirkan tabel berikut, Tabel T-C.31.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai :

- a. Faktor-Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- b. Uruian garis besar mengenai rekapitulasi dan kegiatan.
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program /kegiatan pagu indikatif maupun kombinasi keduanya.
- d. Tabel T-C 33 rencana program dan kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka

pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN TAHUN LALU

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Laporan hasil kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Tahun 2023 yang didalamnya memuat Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan untuk Periode RPJMD Tahun 2021- 2026.

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2023, pelaksanaan kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran ditunjang dengan belanja tidak langsung yang anggarannya diperuntukkan Belanja Pegawai dan Belanja Langsung yang terdiri dari Belanja langsung Urusan Perangkat Daerah dan Belanja Langsung Urusan Wajib dan Pilihan (Program/Kegiatan).

Program/ kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2023 merupakan Anggaran yang didanai oleh APBD/Kab. Adapun uraian ringkas dari Laporan Keuangan Akhir Tahun per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran pada tahun anggaran 2023 mempunyai 8 progam yang teridiri dari 18 Kegiatan, dan 33 Sub Kegiatan dengan besar anggaran yang bersumber dari APBD/Kab dan APBD/Prov sebesar Rp. 11.544.654.265,- dengan penyerapan sebesar Rp. 8.092.095.079,- atau mencapai 70,09 % sehingga terdapat selisih lebih anggaran sebesar Rp. 3.452.559.186,- dan sudah dikembalikan ke Kas Daerah.

Berikut ini disajikan tabel. TC-29 evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran Tahun 2023 yaitu :

Tabel TC-29
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2023
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kabupaten Pangandaran

Nama Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)		Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
		Indikator	Satuan			Target Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3		4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
01.00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN										
2.11	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP										
2.11.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang disusun tepat waktu	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.11.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	24,00	8,00	4,00	4,00	100,00	4,00	16,00	66,66
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.11.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	38,00	37,00	30,00	30,00	100,00	30,00	30,00	66,66
2.11.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	36,00	12,00	6,00	6,00	100,00	6,00	24,00	66,66
2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada	Persentase pengelolaan barang milik	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

	Perangkat Daerah	daerah pada perangkat daerah									
2.11.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	24,00	8,00	4,00	4,00	100,00	4,00	16,00	66,66
2.11.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan retribusi yang diterima Perangkat Daerah	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.11.01.2.04.07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Dokumen	24,00	8,00	4,00	4,00	100,00	4,00	16,00	66,66
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.11.01.2.05.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen	48,00	16,00	8,00	8,00	100,00	8,00	32,00	66,66
2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.11.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	6,00	2,00	1,00	1,00	100,00	1,00	4,00	66,66
2.11.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	9,00	2,00	1,00	1,00	100,00	2,00	5,00	55,55
2.11.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	30,00	10,00	5,00	5,00	100,00	5,00	20,00	66,66
2.11.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Paket	12,00	4,00	2,00	2,00	100,00	2,00	8,00	66,66
2.11.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	388,00	56,00	35,00	25,00	71,43	35,00	116,00	29,90
2.11.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	11,00	3,00	2,00	2,00	100,00	2,00	7,00	63,63
2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.11.01.2.07.10	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sewa Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	Unit	7,00	3,00	1,00	0,00	0,00	2,00	5,00	66,66
2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2.11.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	6,00	2,00	1,00	1,00	100,00	1,00	4,00	66,66
2.11.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12,00	4,00	2,00	2,00	100,00	2,00	8,00	66,66
2.11.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	46,00	14,00	7,00	7,00	100,00	7,00	28,00	60,87
2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana yang baik dan layak fungsi	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

2.11.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Unit	25,00	20,00	20,00	20,00	100,00	20,00	20,00	66,66
2.11.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	37,00	9,00	5,00	2,00	100,00	5,00	16,00	43,24
2.11.03	Program Pengendalian Pencemaran Dan/ Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Prosentase Kualitas Air dan Udara yang memenuhi Baku Mutu	%	31,50	30,77	29,00	26,45	92,81	29,50	29,50	93,65
2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Upaya Penjegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Kota	Kegiatan	10,00	2,00	1,00	1,00	100,00	1,00	4,00	40,00
2.11.03.2.01.01	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Dokumen	6,00	2,00	1,00	1,00	100,00	1,00	4,00	66,66
2.11.03.2.01.02	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	Dokumen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.03.2.01.05	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	Dokumen	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/ Kota	Jumlah Upaya Penanggulangan Pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/ kota	Kegiatan	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00
2.11.03.2.02.02	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	Dokumen	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00
2.11.03.2.02.03	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Lokasi	2,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Ketaatan Terhadap Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	%	30,00	10,00	15,00	0,00	0,00	20,00	20,00	66,66
2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	Jumlah dokumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang disusun	Dokumen	4,00	1,00	2,00	1,00	50,00	1,00	3,00	75,00
2.11.02.2.01.01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.02.2.01.02	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Dokumen	4,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	2,00	50,00
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen KLHS yang disusun	Dokumen	15,00	3,00	1,00	0,00	0,00	2,00	5,00	33,33

2.11.02.2.02.01	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Tata Ruang	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	12,00	2,00	0,00	0,00	0,00	2,00	4,00	33,33
2.11.02.2.02.02	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang Disusun	Dokumen	3,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	33,33
2.11.06	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan PPLH PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemda	%	70,00	72,73	73,00	72,73	99,63	72,00	72,73	103,90
2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	Pelaku Usaha	25,00	7,00	17,00	11,00	64,71	20,00	18,00	72,00
2.11.06.2.01.02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah Pengawas Lingkungan Hidup yang mengikuti bimbingan teknis lingkungan hidup	Orang	4,00	0,00	4,00	4,00	100,00	1,00	5,00	125,00
2.11.06.2.01.03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	6,00	2,00	1,00	1,00	100,00	1,00	4,00	66,66
2.11.05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	Prosentase Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Dibina	%	51,00	13,95	45,00	36,75	81,67	47,00	36,75	72,06
2.11.05.2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan Penghasil LB3 yang memenuhi ketentuan	pelaku usaha	100,00	10	10,00	6,00	60,00	100,00	16,00	16,00
2.11.05.2.01.01	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Dokumen	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.05.2.01.02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	Laporan	6,00	2,00	1,00	1,00	100,00	1,00	4,00	66,66
2.11.11	Program Pengelolaan Persampahan	Cakupan layanan persampahan	%	31,60	31,01	26,00	30,79	117,07	27,90	31,01	98,13
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang terkelola	Ton	17772,39	16418,94	16.747.319	16.747.319	100,00	17082,27	16.747.319	94,23
2.11.11.2.01.02	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	Dokumen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.11.2.01.03	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Paket	23,00	4,00	3,00	3,00	100,00	3,00	10,00	43,48

2.11.11.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Unit	15,00	3,00	2,00	2,00	100,00	3,00	8,00	53,33
2.11.11.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Dokumen	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	100,00
2.11.07	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA Yang Terkait Dengan PPLH	Persentase MHA yang Terdaftar dan terdata	%	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
2.11.07.2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah MHA yang terdaftar dan terdata	MHA	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00
2.11.07.2.02.01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	Dokumen	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00
2.11.08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	%	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00
2.11.08.2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	lembaga masyarakat	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	0,00	0,00
2.11.08.2.01.01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Lembaga Masyarakat	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00
2.11.08.2.01.03	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Orang	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00
2.11.10	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Kasus Yang Ditangani Pemda	%	76,67	0,00	67,00	10	15,00%	70,00	15,00	19,56
2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	Kasus	21,00	0,00	4,00	2,00	50,00	17,00	2,00	9,52
2.11.10.2.01.01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan Kasus Lingkungan	Dokumen	26,00	0,00	4,00	2,00	50,00	22,00	2,00	7,69
2.11.09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Penerapan Adiwiyata Di Lingkungan Pemerintah Daerah	%	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	0,00	0,00

2.11.09.2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sekolah Berperilaku Peduli dan Berbudaya Lingkungan	sekolah	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00
2.11.09.2.01.01	Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah sekolah yang dibina dalam Program Adiwiyata	Organisasi	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
2.11.04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Tutupan Lahan yang dikelola	%	1,00	0,17	0,70	0,70	100,00	0,80	0,70	70,00
2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah Luas Keanekaragaman hayati yang dikelola	Ha	131,40	51,40	71,40	71,40	100,00	91,40	71,40	54,34
2.11.04.2.01.02	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	Dokumen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.11.04.2.01.04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Lokasi	11,00	11,00	11,00	11,00	100,00	11,00	11,00	66,66
2.11.04.2.01.05	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Unit	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Berdasarkan data diatas dengan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan, dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran sebagai berikut :

- a. Volume sampah semakin banyak seiring dengan pertumbuhan penduduk dan bertambahnya pengunjung ke objek wisata
- b. Sarana prasarana pengelolaan sampah terdiri dari :
 - i. TPST 3R masih kurang
 - ii. Bank Sampah masih kurang
 - iii. Armada Pengangkut sampah masih kurang
 - iv. Rumah kompos belum ada
 - v. TPPAS belum dibangun
- c. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal disiplin membuang sampah
- d. Pelaku usaha kurang memperhatikan pengelolaan lingkungan hidup, sehingga sebagian besar pelaku usaha belum memiliki pengolahan limbah cair
- e. Belum adanya laboratorium kualitas lingkungan di Kab. Pangandaran

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Indikator Kinerja Utama sebagai ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan merupakan sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup dan kebersihan Kabupaten Pangandaran.

Indikator Kinerja Utama merupakan pedoman, untuk:

- 1) Penyusunan Rencana Strategis (Renstra);
- 2) Penyusunan Rencana Kerja Tahunan;
- 3) Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja;
- 4) Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 5) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6) Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan.

Tabel T.C. 30
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kabupaten Pangandaran

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	Nilai AKIP Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	-	-	87,00	87,20	87,45	87,65	62,70	66,45	87,45	87,65	
2	Indeks Kualitas Air	-	-	51,75	51,80	51,85	51,90	50,00	50,00	51,85	51,90	
3	Indeks Kualitas Udara	-	-	78,50	79,00	79,50	80,00	88,18	90,96	79,50	80,00	
4	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	-	-	65,25	65,25	65,25	65,25	66,40	38,73	65,25	65,25	

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Dari berbagai isu lingkungan hidup, maka Dinas Lingkungan Hidup dan kebersihan perlu merancang berbagai rencana pembangunan yang ramah lingkungan. Sebagai implikasinya maka peningkatan kompetensi SDM khususnya dibidang lingkungan hidup perlu ditingkatkan. Selanjutnya perumusan rencana pembangunan berwawasan lingkungan perlu melibatkan berbagai sektor, sehingga kuantitas dan kualitas koordinasi juga perlu ditingkatkan. Elemen penting lainnya dalam bidang lingkungan hidup yang berwawasan lingkungan adalah ketersediaan data dan informasi yang lengkap dan akurat tentang kondisi degradasi lingkungan, sehingga di masa yang akan datang sistem data dan informasi lingkungan hidup menjadi salah satu sumber informasi dalam berbagai kegiatan ekonomi, sosial maupun lainnya.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan memiliki kewenangan meliputi :

- a. Pengesahan kelayakan Lingkungan,
- b. Pengesahan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup/ Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup
- c. Menciptakan kelestarian dan kebersihan lingkungan.

Dalam implementasinya, Dinas lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan atau usaha yang telah memperoleh pengesahan dan rekomendasi kelayakan lingkungan. Secara umum permasalahan dapat diatasi dengan cara melakukan koordinasi bersama sektor terkait dan aparat lapangan.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan memberikan kontribusi bagi pencapaian kebijakan prioritas Pembangunan Daerah. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang Infrastruktur tentunya tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal, akan tetapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut harus di pandang suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran. Tantangan yang paling nyata dihadapi kedepan terkait dengan perencanaan adalah bahwa dinamika pembangunan daerah harus bergerak cepat yang diakibatkan oleh adanya perkembangan global di berbagai sektor kehidupan masyarakat yang tidak dapat dihindari. Seiring dengan perkembangan global tersebut, telah diantisipasi dengan berbagai kebijakan yang di keluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Provinsi, hal ini tentu berimplikasi pula terhadap kebijakan yang harus

dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pangandaran agar adanya sinergi dan kesesuaian dalam menjalankan berbagai program dan kegiatan yang di laksanakan.

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan internal maupun eksternal, dalam hal ini dengan menggunakan metode SWOT Analisis. Dalam Analisis SWOT Lingkungan internal meliputi Strength (kekuatan) dan Weaknesses (kelemahan), sedangkan lingkungan eksternal meliputi opportunity (peluang) dan ancaman Threats (Ancaman).

tantangan dan peluang dalam pembangunan pelayanan DLHK adalah sebagai berikut :

- a. Letak geografis dan arah pengembangan tata ruang menempatkan Kabupaten Pangandaran pada posisi strategi, cukup potensial untuk pariwisata dan sudah dikenal sebagai destinasi wisata yang menarik wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Dalam peningkatan pembangunan Kabupaten Pangandaran juga sangat berdampak bagi penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Tantangan yang dihadapi antara lain sebagai berikut :
 - 1) Melakukan perencanaan penataan ruang dan wilayah yang berkelanjutan;
 - 2) Mengurangi alih fungsi lahan yang tidak memenuhi unsur-unsur pelestarian lingkungan hidup;
 - 3) Pembangunan sektor industri dan pertanian yang memperhatikan faktor daya dukung dan daya tampung lingkungan;
 - 4) Pembangunan infrastruktur jalan, bangunan dan pembangunan sektor lainnya yang mempertimbangkan aspek lingkungan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya;
 - 5) Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang semakin beragam dan kompleks;
 - 6) Pengawasan dan penataan hukum lingkungan bagi seluruh pemangku kepentingan di bidang lingkungan hidup.
- b. Penambahan jumlah penduduk baik yang melalui kelahiran maupun migrasi di Kabupaten pangandaran, selain merupakan modal pembangunan juga dapat menjadi dampak negative terhadap lingkungan. Tantangan yang dihadapi adalah sebagai berikut :
 - 1) Bagaimana menyediakan sarana dan prasarana masyarakat yang ramah lingkungan;
 - 2) Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan oleh masyarakat secara bijaksana dan berkeadilan;

- 3) Pembentukan budaya dan perilaku masyarakat yang peduli lingkungan;
 - 4) Pembangunan aspek-aspek sosial kemasyarakatan lainnya.
- c. Reformasi birokrasi yang telah dicanangkan pemerintah, khususnya yang terkait dengan DLHK Kabupaten Pangandaran belum dilaksanakan secara optimal. tantangan yang dihadapi antara lain adalah :
- 1) Upaya meningkatkan profesionalisme aparatur dan transparansi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diembannya, yang pada akhirnya tercipta prinsip-prinsip tata praja bidang lingkungan hidup yang baik (*good environmental government*).
 - 2) Bagaimana menciptakan suatu perencanaan lingkungan yang berkelanjutan tanpa dipengaruhi kondisi politik, sehingga pada saat pengambilan kebijakan-kebijakan, dapat memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.
- d. Mengoptimalkan penegakan hukum lingkungan, adapun tantangan dalam penegakan hukum lingkungan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya materi hukum itu sendiri, keseriusan aparat penegak hukum yang ada, sarana dan fasilitas dalam penegakan hukum, serta tingkat kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah. Di samping beberapa faktor tersebut, kendala dalam penegakan hukum lingkungan juga terletak dalam persoalan ekonomi, alasan ekonomi kerap jadi batu sandungan.
- e. Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung dalam pengelolaan lingkungan, adpun tantangan yang dihadapi diantaranya adalah:
- 1) Terbatasnya kualitas dan kuantitas SDM;
 - 2) Terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan;
 - 3) Tidak sebandingnya pendanaan dengan peningkatan permasalahan lingkungan.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pangandaran RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. RPJMD Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 dalam rangka mewujudkan visi dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2016-2035. RPJMD merupakan pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis setiap

Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun.

Dalam penyusunannya, RPJMD dilakukan secara komprehensif, terpadu dan menyeluruh, serta mengedepankan keterlibatan masyarakat secara partisipatif dengan mempertimbangkan dan menampung aspirasi berbagai pemangku kepentingan. Penyusunan RPJMD Kabupaten Pangandaran tahun 2021-2026 telah disusun melalui proses pendekatan perencanaan pembangunan yaitu politik, teknokratik, partisipatif dan perencanaan yang disusun berdasarkan masukan-masukan dari atas-bawah serta bawah-atas (top down-bottom up).

Namun demikian tentunya masih terdapat berbagai hal yang masih perlu ditindaklanjuti, disamping adanya hal-hal baru yang berkembang selama periode berikutnya, untuk itulah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan untuk menghasilkan rumusan strategi, arah kebijakan dan program pembangunan yang terarah efektif, efisien sehingga mendorong terwujudnya visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan.

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kabupaten Pangandaran bisa dilihat pada tabel T-C.31.

Tabel T-C.31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Pangandaran

Nama SKPD : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	
	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan				9.324.040.959	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan				51.109.083.000	
A	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	1. 100%	4.726.709.451	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi	1. 100%	4.726.709.451	
			2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	2. 100%				2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik	2. 100%		
			3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur	3. 100%				3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur	3. 100%		
			4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	4. 100%				4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	4. 100%		
I	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang disusun tepat waktu	100%	22.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang disusun tepat waktu	100%	22.000.000	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DLHK Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	22.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DLHK Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen	22.000.000	
II	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu	100%	3.091.524.395	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu	100%	3.091.524.395	
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DLHK Kab. Pangandaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang	3.069.524.395	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	DLHK Kab. Pangandaran	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30 Orang	3.069.524.395	
3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DLHK Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6 Dokumen	22.000.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DLHK Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	6 Dokumen	22.000.000	
III	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase pengelolaan barang milik daerah pada perangkat daerah	100%	22.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Persentase pengelolaan barang milik daerah pada perangkat daerah	100%	22.000.000	
4	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	DLHK Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	22.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	DLHK Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	22.000.000	

IV	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Persentase penatausahaan retribusi yang diterima Perangkat Daerah	100%	22.000.000	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah		Persentase penatausahaan retribusi yang diterima Perangkat Daerah	100%	22.000.000	
6	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	DLHK Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	22.000.000	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	DLHK Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan	22.000.000	
V	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	100%	18.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	100%	18.000.000	
8	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	DLHK Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	8 Dokumen	18.000.000	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	DLHK Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	8 Dokumen	18.000.000	
VI	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	100%	219.462.649	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	100%	219.462.649	
10	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DLHK Kab. Pangandaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.491.580	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	DLHK Kab. Pangandaran	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2.491.580	
11	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DLHK Kab. Pangandaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	44.997.559	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	DLHK Kab. Pangandaran	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 paket	44.997.559	
13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DLHK Kab. Pangandaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	88.500.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	DLHK Kab. Pangandaran	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	88.500.000	
14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DLHK Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	20.474.010	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	DLHK Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen	20.474.010	
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DLHK Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	44.999.500	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DLHK Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	35 Laporan	44.999.500	
16	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	DLHK Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	18.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	DLHK Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen	18.000.000	
VII	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	100%	120.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	100%	120.000.000	
18	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DLHK Kab. Pangandaran	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	120.000.000	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	DLHK Kab. Pangandaran	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit	120.000.000	
VIII	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	100%	151.690.348	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	100%	151.690.348	
19	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DLHK Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.500.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DLHK Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	2.500.000	
20	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DLHK Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 Laporan	34.609.725	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	DLHK Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	2 Laporan	34.609.725	

			yang Disediakan					yang Disediakan			
21	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DLHK Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan	114.580.623	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	DLHK Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan	114.580.623	
IX	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase sarana dan prasarana yang baik dan layak fungsi	100%	1.060.032.059	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase sarana dan prasarana yang baik dan layak fungsi	100%	1.060.032.059	
22	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DLHK Kab. Pangandaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	1.055.532.059	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	DLHK Kab. Pangandaran	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit	1.055.532.059	
23	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DLHK Kab. Pangandaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	4.500.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	DLHK Kab. Pangandaran	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	7 Unit	4.500.000	
B	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		Ketaatan Terhadap Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	25%	15.000.000	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		Ketaatan Terhadap Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	25%	15.000.000	
X	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang disusun	1 Dokumen	15.000.000	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang disusun	1 Dokumen	15.000.000	
26	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1 Dokumen	15.000.000	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1 Dokumen	15.000.000	
C	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		Prosentase Kualitas Air dan Udara yang memenuhi Baku Mutu	30,50%	45.000.000	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		Prosentase Kualitas Air dan Udara yang memenuhi Baku Mutu	30,50%	45.000.000	
XII	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Jumlah Upaya Penjegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Kota	1 Kegiatan	45.000.000	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Jumlah Upaya Penjegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Kota	1 Kegiatan	45.000.000	
28	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	45.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kab. Pangandaran	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen	45.000.000	
D	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		Persentase Tutupan Lahan yang dikelola	0,90%	1.472.553.341	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		Persentase Tutupan Lahan yang dikelola	0,90%	11.182.098.382	
XIII	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		Jumlah Luas Keanekaragaman hayati yang dikelola	111,4 Ha	1.472.553.341	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		Jumlah Luas Keanekaragaman hayati yang dikelola	111,4 Ha	11.182.098.382	

30	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kab. Pangandaran	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	11 Lokasi	1.427.553.341	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Kab. Pangandaran	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	11 Lokasi	1.427.553.341	
31	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Kab. Pangandaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	1 Unit	45.000.000	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Kab. Pangandaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	1 Unit	9.754.545.041	APBD Prov.
E	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		Prosentase Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Dibina	49,00%	14.999.200	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		Prosentase Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Dibina	49,00%	14.999.200	
XIV	Penyimpanan Sementara Limbah B3		Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan Penghasil LB3 yang memenuhi ketentuan	100 Pelaku Usaha	14.999.200	Penyimpanan Sementara Limbah B3		Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan Penghasil LB3 yang memenuhi ketentuan	100 Pelaku Usaha	14.999.200	
32	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Kab. Pangandaran	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	14.999.200	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Pangandaran	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1 Dokumen	14.999.200	
F	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan PPLH PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemda	71%	14.999.300	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan PPLH PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemda	71%	14.999.300	
XV	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pelaksanaan Usaha/Kegiatan yang mematuhi Komitmen Izin Lingkungan	20 Pelaku Usaha	14.999.300	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Pelaksanaan Usaha/Kegiatan yang mematuhi Komitmen Izin Lingkungan	20 Pelaku Usaha	14.999.300	
35	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1 Badan Usaha	14.999.300	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kab. Pangandaran	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	1 Badan Usaha	14.999.300	
J	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase Kasus Yang Ditangani Pemda	73.33%	14.991.950	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase Kasus Yang Ditangani Pemda	73.33%	14.991.950	
XIX	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)		Jumlah Pengaduan yang ditangani	19 Kasus	14.991.950	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)		Jumlah Pengaduan yang ditangani	19 Kasus	14.991.950	

	Kabupaten/Kota					Kabupaten/Kota					
40	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	24 Dokumen	14.991.950	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	6 Pengaduan	14.991.950	
K	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Cakupan layanan persampahan	29,50%	3.019.787.717	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Cakupan layanan persampahan	29,50%	35.095.284.717	
XX	Pengelolaan Sampah		Jumlah sampah yang terkelola	17423,91 ton	3.019.787.717	Pengelolaan Sampah		Jumlah sampah yang terkelola	17423,91 ton	35.095.284.717	
44	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	17423,91 ton	3.019.787.717	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSA, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Kab. Pangandaran	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSA, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	17423,91 ton	3.019.787.717	
45	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	0Unit	0	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	4 Unit	32.075.497.000	APBD Prov.

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Berdasarkan hasil musrenbang desa/kelurahan, Musrenbang RKPD di kecamatan maupun hasil musrenbang kabupaten diperoleh hasil bahwa untuk Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kabupaten Pangandaran tahun 2025 terdapat beberapa usulan kegiatan terkait dengan urusan Lingkungan Hidup. Adapaun Program dan kegiatan yang di usulkan masyarakat dapat dilihat pada tabel T-C.32.

Tabel T-C.32
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025
Kabupaten Pangandaran

Nama Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

No	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Pagu	Catatan
	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan					
1	PP Pengelolaan TPS3R – Program Penge;lolaaan Persampahan	Dusun Bojongsari Rt.02 Rw.01 Desa Babakan Kec. Pangandaran	Jumlah Kendaraan Pengangkut sampah	1 Unit	56000000	Disetujui

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Prioritas pembangunan Kabupaten Pangandaran tahun 2025 disusun dengan mengacu dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026, Program Prioritas/ Strategis Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pangandaran Tahun 2018-2038, dan pokok-pokok pikiran DPRD.

A. Tema RKP (Rencana Kerja Pemerintah) Tahun 2025 dengan tema “PENINGKATAN DAYA SAING DAERAH” Tema pembangunan daerah tahun 2025 ditetapkan sebagai upaya untuk meningkatkan eksistensi, kemandirian, dan persaingan Pemerintah Kabupaten Pangandaran di tingkat provinsi dan nasional dalam berbagai bidang khususnya pada aspek daya saing sesuai dengan potensi yang dimiliki. Aspek daya saing daerah sesuai dengan indikator nasional Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) dijabarkan ke dalam empat aspek indikator yaitu aspek ekosistem inovasi, aspek penguat/enabling environment, aspek SDM/Human Capital, aspek pasar/market. Kebijakan tersebut didukung dari beberapa potensi dan capaian kinerja pembangunan daerah di beberapa tahun terakhir diantaranya PDRB, pendapatan per kapita, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), IPM yang menunjukkan peningkatan. Namun dari sisi kemampuan fiskal dan pendapatan daerah masih rendah jika dibandingkan dengan daerah lain khususnya kabupaten/kota tetangga, oleh karenanya tema peningkatan daya saing daerah sudah sesuai dengan kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan pada tahun 2025 melalui intervensi kebijakan yang diarahkan pada peningkatan persaingan daerah khususnya di sektor SDM, perekonomian, dan inovasi daerah

B. Prioritas Pembangunan Nasional RKP Tahun 2025 meliputi:

1. Peningkatan pertumbuhan ekonomi untuk mendorong perekonomian masyarakat I-7 melalui penguatan industri pariwisata sebagai lokomotif pengembangan UMKM, peningkatan iklim investasi, dan pemberdayaan petani, nelayan, serta pembudidaya;
2. Penguatan sistem pendidikan kesetaraan, inklusif, berkarakter, dan berbudaya;
3. Peningkatan kualitas dan aksesibilitas layanan kesehatan;
4. Pembangunan sosial budaya masyarakat yang tanggap terhadap bencana;

5. Pengelolaan lingkungan hidup dan pemerataan wilayah melalui penataan infrastruktur dasar, aksesibilitas serta konektivitas menuju pusat kegiatan strategis; dan
6. Reformasi birokrasi dan inovasi dalam tata kelola pemerintah dan pelayanan publik berbasis digital serta penguatan kondusifitas daerah dan stabilitas politik.

Tema dan Arah Kebijakan Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2023-2025 sebagaimana yang sudah tercantum dalam RPJPD Provinsi Jawa Barat (Tahun 2005-2025) yaitu:

**“PEMERATAAN PEMBANGUNAN UNTUK MENDUKUNG AKSELERASI
PERTUMBUHAN EKONOMI MASYARAKAT JAWA BARAT”**

1. Prioritas 1, yaitu Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Peningkatan Kapasitas UMKM, Petani, Nelayan dan Budidaya untuk Membuka Lapangan Kerja Seluas-luasnya;
2. Prioritas 2, yaitu Reformasi Sistem Pendidikan, Pemajuan Kebudayaan, Pendidikan Agama dan Kehidupan Beragama;
3. Prioritas 3, yaitu Penguatan Sistem Kesehatan Daerah;
4. Prioritas 4, yaitu Penguatan Sistem Perlindungan Sosial dan Kesiapsiagaan Penanganan Risiko Bencana;
5. Prioritas 5, yaitu Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Gerakan Membangun Desa;
6. Prioritas 6, yaitu Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah.

Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 sebagaimana yang sudah tercantum dalam RPJMD Kabupaten Pangandaran (Tahun 2021-2026) dengan:

A. Visi **“Pangandaran Juara Menuju Wisata Berkelas Dunia Yang Berpijak Pada Nilai Karakter Bangsa”**.

B. Misi:

1. Mewujudkan Kehidupan Masyarakat yang Beriman Taqwa dan Mewujudkan Kerukunan Kehidupan Beragama
2. Mengembangkan Wisata dengan Memperluas Akses dan Penataan Berkelanjutan

3. Mengembangkan Aksesibilitas Pendidikan Sampai Perguruan Tinggi, dan Peningkatan Kesejahteraan Tenaga Kependidikan serta Peningkatan Kompetensi Lulusan
4. Meningkatkan Ketahanan Ekonomi dan Sosial yang Berkeadilan Berbasis Potensi Lokal
5. Mewujudkan Reformasi Birokrasi yang Melayani, Efektif, Efisien, dan Akuntabel
6. Peningkatan Pembangunan Infrastruktur, Penataan Ruang dan Mitigasi Bencana Yang Terintegrasi, Dan Berkelanjutan

Tema RKPD Tahun 2024 sebagaimana mana juga menjadi tema musrenbang yaitu:

“Peningkatan Daya Saing Daerah”

Berdasarkan tema tersebut maka dapat dikelompokkan menjadi prioritas pembangunan yaitu:

1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya;
2. Penguatan Sistem Pendidikan Kesenjangan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya;
3. Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan;
4. Pembangunan Sosial Budaya Masyarakat yang Tanggap terhadap Bencana;
5. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis;
6. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Sasaran Strategis merupakan proses penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu suatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata dalam kurun waktu selama tahun 2025.

Adapun **Tujuan** Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran yaitu :

1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup.
2. Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance);

Dengan **sasaran** sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Air;
2. Meningkatnya Kualitas Udara;
3. Meningkatkan Kualitas Tutupan Lahan.
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;

No	Tujuan	No	Sasaran Strategis
1	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	1	Meningkatnya Kualitas Air;
		2	Meningkatnya Kualitas Udara;
		3	Meningkatkan Kualitas Tutupan Lahan.
2	Meningkatkan kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik (good governance);	4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan;

1.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 sebagai mana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 21 tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan untuk menindaklanjuti amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, maka Program prioritas yang rencananya akan dibiayai pada tahun 2025 dimaping/dipetakan sesuai kepmendagri 900.1.15.5-1317 tahun 2023 tentang perubahan atas keputusan menteri dalam negeri nomor 050-5889 tahun 2021 .

Rencana Kerja Dinas Lingkungan hidup dan Kebersihan Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Penyusunan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran mengacu pada prioritas pembangunan dalam RKPD serta tujuan, sasaran dan indikator Kinerja yang tertuang dalam Renstra. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran menyelenggarakan urusan wajib Urusan Lingkungan Hidup.

Rencana program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran merupakan program dan kegiatan terpilih berdasarkan kebutuhan dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah serta RKPD Kabupaten Pangandaran

Tahun 2025 untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. Rencana program dan kegiatan tersebut disertai dengan indikator kinerja, target, satuan, pagu indikatif serta lokasi, sehingga rencana program dan kegiatan tersebut menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 Dapat dilihat pada Tabel T-C.33.

Tabel T-C.33
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025
dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Pangandaran

Nama Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan

No	Urusan/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan				51.109.083.000				12.649.371.517
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Persentase sarana prasarana kantor yang terpenuhi		1. 100%	4.726.709.451			1. 100%	5.947.101.042
		2. Persentase laporan keuangan dengan kualitas baik		2. 100%				2. 100%	
		3. Persentase peningkatan kompetensi aparatur		3. 100%				3. 100%	
		4. Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas		4. 100%				4. 100%	
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang disusun tepat waktu		100%	22.000.000			100%	24.000.000
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	DLHK Kab. Pangandaran	4 Dokumen	22.000.000	APBD Kab.		4 Dokumen	24.000.000
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu		100%	3.091.524.395			100%	3.850.601.042
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	DLHK Kab. Pangandaran	30 Orang	3.069.524.395	APBD Kab.		30 Orang	3.826.601.042
4	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	DLHK Kab. Pangandaran	6 Dokumen	22.000.000	APBD Kab.		6 Dokumen	24.000.000
C	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan barang milik daerah pada perangkat daerah		100%	22.000.000			100%	24.000.000
5	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	DLHK Kab. Pangandaran	4 Laporan	22.000.000	APBD Kab.		4 Laporan	24.000.000

D	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan retribusi yang diterima Perangkat Daerah		100%	22.000.000			100%	24.000.000
6	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	DLHK Kab. Pangandaran	4 Laporan	22.000.000	APBD Kab.		4 Laporan	24.000.000
E	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik		100%	18.000.000			100%	22.000.000
7	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	DLHK Kab. Pangandaran	8 Dokumen	18.000.000	APBD Kab.		8 Dokumen	22.000.000
F	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik		100%	219.462.649			100%	368.000.000
8	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	DLHK Kab. Pangandaran	1 Paket	2.491.580	APBD Kab.		1 Paket	4.000.000
9	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DLHK Kab. Pangandaran	2 paket	44.997.559	APBD Kab.		2 paket	75.000.000
10	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	DLHK Kab. Pangandaran	5 Paket	88.500.000	APBD Kab.		5 Paket	120.000.000
11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	DLHK Kab. Pangandaran	2 Dokumen	20.474.010	APBD Kab.		2 Dokumen	22.000.000
12	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	DLHK Kab. Pangandaran	35 Laporan	44.999.500	APBD Kab.		70 Laporan	125.000.000
13	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	DLHK Kab. Pangandaran	2 Dokumen	18.000.000	APBD Kab.		2 Dokumen	22.000.000
G	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi		100%	120.000.000			100%	150.000.000
14	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	DLHK Kab. Pangandaran	1 Unit	120.000.000	APBD Kab.		1 Unit	150.000.000
H	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan		100%	151.690.348			100%	178.500.000
15	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DLHK Kab. Pangandaran	1 Laporan	2.500.000	APBD Kab.		1 Laporan	3.500.000
16	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	DLHK Kab. Pangandaran	2 Laporan	34.609.725	APBD Kab.		2 Laporan	45.000.000
17	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	DLHK Kab. Pangandaran	8 Laporan	114.580.623	APBD Kab.		8 Laporan	130.000.000
I	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana yang baik dan layak fungsi		100%	1.060.032.059			100%	1.306.000.000

18	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	DLHK Kab. Pangandaran	25 Unit	1.055.532.059	APBD Kab.		25 Unit	1.300.000.000
19	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	DLHK Kab. Pangandaran	7 Unit	4.500.000	APBD Kab.		7 Unit	6.000.000
II	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Ketaatan Terhadap Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup		25%	15.000.000			25%	35.000.000
J	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang disusun		1 Dokumen	15.000.000			1 Dokumen	35.000.000
20	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	1 Dokumen	15.000.000	APBD Kab.		1 Dokumen	35.000.000
III	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Prosentase Kualitas Air dan Udara yang memenuhi Baku Mutu		30,50%	45.000.000			30,50%	55.000.000
K	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Upaya Penjegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Kota		1 Kegiatan	45.000.000			1 Kegiatan	55.000.000
21	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kab. Pangandaran	1 Dokumen	45.000.000	APBD Kab.		1 Dokumen	55.000.000
IV	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Tutupan Lahan yang dikelola		0,90%	11.182.098.382			0,90%	1.598.870.475
L	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah Luas Keanekaragaman hayati yang dikelola		111,4 Ha	11.182.098.382			111,4 Ha	1.598.870.475
22	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab. Pangandaran	11 Lokasi	1.427.553.341	APBD Kab.		11 Lokasi	1.553.870.475
23	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	Kab. Pangandaran	1 Unit	9.754.545.041	APBD Kab. APBD Prov.		1 Unit	45.000.000
V	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Prosentase Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Dibina		49,00%	14.999.200			49,00%	35.000.000
M	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan Penghasil LB3 yang memenuhi ketentuan		100 Pelaku Usaha	14.999.200			100 Pelaku Usaha	35.000.000
24	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Kab. Pangandaran	1 Dokumen	14.999.200	APBD Kab.		1 Dokumen	35.000.000
VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan PPLH		71%	14.999.300			71%	65.000.000

	PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemda							
N	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan Usaha/Kegiatan yang mematuhi Komitmen Izin Lingkungan		20 Pelaku Usaha	14.999.300			20 Pelaku Usaha	65.000.000
25	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	Kab. Pangandaran	1 Badan Usaha	14.999.300	APBD Kab.		1 Badan Usaha	65.000.000
VII	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Kasus Yang Ditangani Pemda		73.33%	14.991.950			73.33%	60.000.000
O	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan yang ditangani		19 Kasus	14.991.950			19 Kasus	60.000.000
26	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	Kab. Pangandaran	6 Pengaduan	14.991.950	APBD Kab.		24 Pengaduan	60.000.000
VIII	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Cakupan layanan persampahan		29,50%	35.095.284.717			29,50%	4.853.400.000
P	Pengelolaan Sampah	Jumlah sampah yang terkelola		17423,91 ton	35.095.284.717			17423,91 ton	4.853.400.000
27	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Kab. Pangandaran	17423,91 ton	3.019.787.717	APBD Kab.		17423,91 ton	4.588.400.000
28	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	Kab. Pangandaran	4 Unit	32.075.497.000	APBD Kab. APBD Prov.		4 Unit	265.000.000

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana program dan kegiatan daerah tahun 2025 merupakan formulasi dari hasil rangkaian pembahasan substansi program dan kegiatan yang telah dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Tahun 2024 untuk RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2024. Musrembang menjadi media untuk membahas rencana rencana program dan kegiatan prioritas dengan pemangku kepentingan yang terdiri dari pihak akademisi, dunia usaha, komunitas, pemerintahan, dan masyarakat Kabupaten Pangandaran.

Penentuan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran tahun 2025 berpedoman pada RKPD Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 dan memperhatikan keterkaitannya dengan prioritas pembangunan provinsi dan nasional tahun 2025. Pendanaan program dan kegiatan prioritas selanjutnya dilaksanakan dengan kolaborasi potensi pendanaan lainnya selain anggaran yang bersumber dari pemerintah (APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, dan APBN) juga yang memanfaatkan pendanaan yang bersumber dari KPBU, CSR, dana umat, pinjaman daerah, obligasi daerah, serta sumber pendanaan lainnya. Dengan memperhatikan hasil evaluasi pencapaian pembangunan tahun sebelumnya maka prioritas dan sasaran pembangunan dalam Kabupaten Pangandaran tahun 2025 yang dijabarkan dalam program dan kegiatan, Adapun tema Pembangunan Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 adalah “Peningkatan Daya Saing Daerah” dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi untuk Mendongkrak Perekonomian Masyarakat melalui Penguatan Industri Pariwisata sebagai lokomotif Pengembangan UMKM, Peningkatan Iklim Investasi, dan Pemberdayaan Petani, Nelayan, serta Pembudidaya;
2. Penguatan Sistem Pendidikan Kesetaraan, Inklusif, Berkarakter, dan Berbudaya;
3. Peningkatan Kualitas dan Aksesibilitas Layanan Kesehatan;
4. Pembangunan Sosial Budaya Masyarakat yang Tanggap terhadap Bencana;
5. Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis;
6. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik.

Belanja daerah tahun 2025 antara lain diarahkan untuk pemenuhan pembiayaan belanja yang bersifat wajib dan mengikat untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat, penyelenggaraan urusan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar, urusan wajib tidak terkait

pelayanan dasar dan urusan pilihan sesuai dengan potensi daerah. Selain itu, belanja daerah juga digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan strategis yang menjadi prioritas pembangunan Kabupaten Pangandaran tahun 2025.

Proyeksi belanja selanjutnya dijabarkan dalam rencana program/ kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran beserta pagu indikatif yang kemudian dituangkan dalam Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan.

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran Tahun 2025 ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya yang dilaksanakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang pada hakekatnya merupakan rencana capaian kinerja tahun yang bersangkutan, disusun dengan memperhatikan program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran Tahun 2021-2026 serta mengacu Kepada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Dalam pelaksanaannya dukungan dan peran aktif seluruh Bagian/Bidang dan Sub Bagian akan sangat menentukan hasil capaian program dan kegiatan.

Demikian Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Pangandaran disusun sebagai acuan dan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pada lingkup Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2025.

Parigi, 26 Juli 2024

Kepala
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kabupaten Pangandaran



DEDI SURACHMAN, S.SOS., M.M

NIP : 197106282003121005

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KAB. PANGANDARAN
TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN						51.109.083.000,00							12.649.371.517,00	
	2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						51.109.083.000,00							12.649.371.517,00	
	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						51.109.083.000,00							12.649.371.517,00	
1.	2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase perencanaan dan evaluasi kinerja yang berkualitas	100 %			100 %	4.726.709.451,00						100 %	5.947.101.042,00	
	2.11.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase perencanaan, penganggaran dan evaluasi yang disusun tepat waktu	100 %			100 %	22.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Aparatur	100 %	24.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	22.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Aparatur		24.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<i>Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu</i>	100 %			100 %	3.091.524.395,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Aparatur	100 %	3.850.601.042,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				30 Orang/bulan	3.069.524.395,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Aparatur		3.826.601.042,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				6 Dokumen	22.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Aparatur		24.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	<i>Persentase pengelolaan barang milik daerah pada perangkat daerah</i>	100 %			100 %	22.000.000,00			-	-	Aparatur	100 %	24.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD</i>				4 Laporan	22.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		24.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Persentase penatausahaan retribusi yang diterima Perangkat Daerah	100 %			100 %	22.000.000,00			-	-	Aparatur	100 %	24.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah														
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah				4 Dokumen	22.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		24.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah yang baik	100 %			100 %	18.000.000,00			-	-	Aparatur	100 %	22.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian				8 Dokumen	18.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		22.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi umum Perangkat Daerah yang baik	100 %			100 %	219.462.649,00			-	-	Aparatur	100 %	368.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	2.491.580,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		4.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	44.997.559,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		75.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				5 Paket	88.500.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		120.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				2 Dokumen	20.474.010,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		22.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				35 Laporan	44.999.500,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		125.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				2 Dokumen	18.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Aparatur		22.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pengadaan Barang Milik Daerah yang terealisasi	100 %			100 %	120.000.000,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Aparatur	100 %	150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				1 Unit	120.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	-	Aparatur		150.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan Persentase jasa penunjang urusan pemerintahan yang disediakan	100 %			100 % 100 %	151.690.348,00			-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifita s Daerah dan Stabilitas Politik	Aparatur	100 %	178.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	2.500.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifita s Daerah dan Stabilitas Politik	Aparatur		3.500.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	34.609.725,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifita s Daerah dan Stabilitas Politik	Aparatur		45.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				8 Laporan	114.580.623,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifita s Daerah dan Stabilitas Politik	Aparatur		130.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase sarana dan prasarana yang baik dan layak fungsi	100 %			100 %	1.060.032.059,00			Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Aparatur	100 %	1.306.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				25 Unit	1.055.532.059,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Aparatur		1.300.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				7 Unit	4.500.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan	Inovasi Pelayanan Publik dan Penataan Daerah. Reformasi Birokrasi dan Inovasi dalam Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik Berbasis Digital serta Penguatan Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Politik	Aparatur		6.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
2.	2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Ketaatan Terhadap Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	25 %			25 %	15.000.000,00						25 %	35.000.000,00	
	2.11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang disusun	5 Dokumen			1 Dokumen	15.000.000,00			Memperkuat Penyelaras Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pengelolaa n Lingkungan Hidup dan Pemerataa n Wilayah melalui Penataan I nfrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis	Pelaku Usaha/ Masyarakat	1 Dokumen	35.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota				1 Dokumen	15.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Pengembangan Infrast ruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan M embangun Desa Pengelolaa n Lingkungan Hidup dan Pemerataa n Wilayah melalui Penataan I nfrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis	Pelaku Usaha/ Masyarakat		35.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
3.	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Kualitas Air dan Udara yang memenuhi Baku Mutu	30,50 %			30,50 %	45.000.000,00						30,50 %	55.000.000,00	
	2.11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Upaya Penjegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten Kota	-			1 Kegiatan	45.000.000,00			Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Pengembangan Infrast ruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan M embangun Desa Pengelolaa n Lingkungan Hidup dan Pemerataa n Wilayah melalui Penataan I nfrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis	Pelaku Usaha/ Masyarakat	-	55.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut														
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut				1 Dokumen	45.000.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Pengemba ngen Infrast ruktur Kone ktivitas Wilayah dan Pengel olaan Lingkungan Hidup serta Gerakan M embangun Desa Pengelolaa n Lingkungan Hidup dan Pemerataa n Wilayah melalui Penataan I nfrastruktur Dasar, Aks esibilitas serta Kone ktivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis	Pelaku Usaha/ Masyarakat		55.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
4.	2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Tutupan Lahan yang dikelola	0,90 %			0,90 %	11.182.098.382,00						0,90 %	1.598.870.475,00	
	2.11.04.2.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Jumlah Luas Keanekaragaman hayati yang dikelola	131,4 Ha			111,4 Ha	11.182.098.382,00			Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Pengemba ngen Infrast ruktur Kone ktivitas Wilayah dan Pengel olaan Lingkungan Hidup serta Gerakan M embangun Desa Pengelolaa n Lingkungan Hidup dan Pemerataa n Wilayah melalui Penataan I nfrastruktur Dasar, Aks esibilitas serta Kone ktivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis	Pelaku Usaha/ Masyarakat	131,4 Ha	1.598.870.475,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)														
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota				111,4 Ha	1.427.553.341,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Pembangunan Desa Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis	Pelaku Usaha/ Masyarakat		1.553.870.475,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola				2 Unit	9.754.545.041,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Pembangunan Desa Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Pemerataan Wilayah melalui Penataan Infrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis	Pelaku Usaha/ Masyarakat		45.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5.	2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Dibina	49 %			49 %	14.999.200,00						49 %	35.000.000,00	
	2.11.05.2.01	Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan Penghasil LB3 yang memenuhi ketentuan	100 Pelaku Usaha			100 Pelaku Usaha	14.999.200,00			Memperku a Penyelara san Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Pengemba ngan Infrast ruktur Kone ktivitas Wilayah dan Pengel olaan Lingkungan Hidup serta Gerakan M embangun Desa Pengelolaa n Lingkungan Hidup dan Pemerataa n Wilayah melalui Penataan I nfrastruktur Dasar, Aks esibilitas serta Kone ktivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis	Pelaku Usaha/ Masyarakat	100 Pelaku Usaha	35.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.05.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Fasilitas Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik				1 Dokumen	14.999.200,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Pengemba ngan Infrast ruktur Kone ktivitas Wilayah dan Pengel olaan Lingkungan Hidup serta Gerakan M embangun Desa Pengelolaa n Lingkungan Hidup dan Pemerataa n Wilayah melalui Penataan I nfrastruktur Dasar, Aks esibilitas serta Kone ktivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis	Pelaku Usaha/ Masyarakat		35.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
6.	2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Ketaatan Pelaku Usaha Atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan PPLH PUU LH Yang Diterbitkan Oleh Pemda	71 %			71 %	14.999.300,00						71 %	65.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.06.2.01	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	20 Pelaku Usaha			20 Pelaku Usaha	14.999.300,00			Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Pengemba ngan Infrast ruktur Kone ktivitas Wilayah dan Pengel olaan Lingkungan Hidup serta Gerakan M embangun Desa Pengelolaa n Lingkungan Hidup dan Pemerataa n Wilayah melalui Penataan I nfrastruktur Dasar, Aks esibilitas serta Kone ktivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis	Pelaku Usaha/ Masyarakat	20 Pelaku Usaha	65.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.06.2.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup														
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				1 Badan Usaha	14.999.300,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Pengemba ngan Infrast ruktur Kone ktivitas Wilayah dan Pengel olaan Lingkungan Hidup serta Gerakan M embangun Desa Pengelolaa n Lingkungan Hidup dan Pemerataa n Wilayah melalui Penataan I nfrastruktur Dasar, Aks esibilitas serta Kone ktivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis	Pelaku Usaha/ Masyarakat		65.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
7.	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Kasus Yang Ditangani Pemda	73,33 %			73,33 %	14.991.950,00						73,33 %	60.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.10.2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Pengaduan yang ditangani</i>	21 Kasus			19 Kasus	14.991.950,00			Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Pengemba ngan Infrast ruktur Kone ktivitas Wilayah dan Pengel olaan Lingkungan Hidup serta Gerakan M embangun Desa Pengelolaa n Lingkungan Hidup dan Pemerataa n Wilayah melalui Penataan I nfrastruktur Dasar, Aks esibilitas serta Kone ktivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis	Masyarakat Kab. Pangandaran	21 Kasus	60.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.10.2.01.0004	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani</i>				24 Pengaduan	14.991.950,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Pengemba ngan Infrast ruktur Kone ktivitas Wilayah dan Pengel olaan Lingkungan Hidup serta Gerakan M embangun Desa Pengelolaa n Lingkungan Hidup dan Pemerataa n Wilayah melalui Penataan I nfrastruktur Dasar, Aks esibilitas serta Kone ktivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis	Masyarakat Kab. Pangandaran		60.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
8.	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	<i>Cakupan layanan persampahan</i>	29,50 %			29,50 %	35.095.284.717,00						29,50 %	4.853.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	<i>Jumlah sampah yang terkelola</i>	17772,389 ton			17423,91 ton	35.095.284.717,00			Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Pengemba ngan Infrast ruktur Kone ktivitas Wilayah dan Pengel olaan Lingkungan Hidup serta Gerakan M embangun Desa Pengelolaa n Lingkungan Hidup dan Pemerataa n Wilayah melalui Penataan I nfrastruktur Dasar, Aks esibilitas serta Kone ktivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis	Pelaku Usaha/ Masyarakat	17772,389 ton	4.853.400.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.11.2.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota														
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir</i>				4 Unit	32.075.497.000,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI	Memperkuat Penyelaras an Kehidupan yang Harmonis dengan Lin gkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Pengemba ngan Infrast ruktur Kone ktivitas Wilayah dan Pengel olaan Lingkungan Hidup serta Gerakan M embangun Desa Pengelolaa n Lingkungan Hidup dan Pemerataa n Wilayah melalui Penataan I nfrastruktur Dasar, Aks esibilitas serta Kone ktivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis	Pelaku Usaha/ Masyarakat		265.000.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
	2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank Sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, Bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan				17423,91 Ton	3.019.787.717,00	Kab. Pangandaran, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peninggkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur	Pengembangan Infrastruktur Konektivitas Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Gerakan Membangun Desa Pengelolaa n Lingkungan Hidup dan Pemerataa n Wilayah melalui Penataan I nfrastruktur Dasar, Aksesibilitas serta Konektivitas menuju Pusat Kegiatan Strategis	Pelaku Usaha/ Masyarakat		4.588.400.000,00	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN	
	JUMLAH							51.109.083.000,00							12.649.371.517,00		